



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR PENANGGULANGAN BANJIR DI JALAN SIMO HILIR KECAMATAN SUKOMANUNGGAL

^{1*}Nadia Chyka Aulia, ²Baster Handinata Sembiring, ³Yeris Okta Marioko,
⁴Oktarizka Reviandani
^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
*Corresponding Email: 22041010016@student.upnjatim.ac.id

Sitasi:

Riwayat Artikel

Dikirim: 11-06-2025

Direvisi: 26-06-2025

Diterima: 29-06-2025

Abstract

This study examines the implementation of flood mitigation infrastructure policies on Jalan Simo Hilir, Surabaya, which is often hit by flooding due to high rainfall and bozem failure. This problem significantly hinders community mobility and economic activity. The purpose of this study is to analyze the implementation of these policies and identify obstacles and strategies for improvement. Using a qualitative descriptive method and George C. Edward III's implementation theory approach (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure), data was collected through interviews with relevant stakeholders. The results indicate that the policy implementation is generally effective, supported by strong coordination, human resource readiness, and leadership commitment. However, there are several inhibiting factors, namely low public awareness of waste disposal, lack of precision in technical construction calculations, and an unwise social response after the flood. Therefore, continuous efforts are needed that not only focus on government evaluation but also on increasing public awareness and technical planning precision to optimize flood mitigation in the future.

Keywords: Implementation; Infrastructure; Policy; Flooding; Simo Hilir

Abstrak

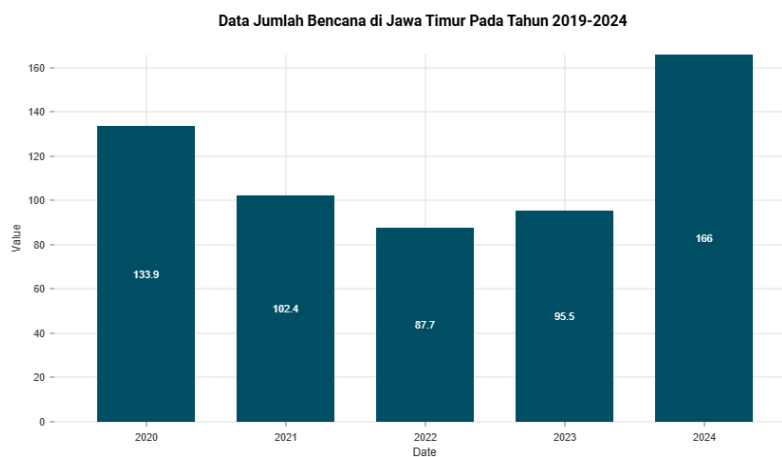
Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Jalan Simo Hilir, Surabaya, yang sering dilanda luapan air akibat curah hujan tinggi dan kegagalan fungsi bozem. Permasalahan ini secara signifikan menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut serta mengidentifikasi kendala dan strategi peningkatannya. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan teori implementasi George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil menunjukkan implementasi kebijakan secara umum berjalan efektif, didukung oleh koordinasi yang solid, kesiapsiagaan sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, kurangnya ketelitian perhitungan teknis konstruksi, dan respons sosial yang kurang bijak pasca-banjir. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada evaluasi pemerintah, tetapi juga pada peningkatan kesadaran publik dan presisi perencanaan teknis untuk mengoptimalkan mitigasi banjir di masa mendatang.

Kata kunci: Implementasi; Infrastruktur; Kebijakan; Banjir; Simo Hilir

1. PENDAHULUAN [HEADING 1]

Banjir adalah suatu kondisi ketika air meluap dan menggenangi area yang biasanya kering. Banjir dapat terjadi karena banyak hal, seperti curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, dan aktivitas manusia yang mengubah cara lahan digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), banjir terjadi ketika air mengalir deras dan meluap, seperti pada sungai saat hujan turun terus-menerus. Banjir merupakan bencana yang berdampak pada kehidupan manusia, ditandai dengan genangan air dalam berbagai skala, mulai dari yang kecil hingga besar. Kejadian ini dapat disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia, serta terjadi ketika aliran air yang tinggi tidak dapat ditampung oleh sungai, sehingga meluap ke daerah yang lebih rendah (Setiawan et al., 2020). Provinsi Jawa Timur memiliki dua sungai utama yang berperan signifikan dalam sistem hidrologinya, yakni Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Kedua sungai ini memiliki banyak anak sungai serta aliran kecil yang tersebar di berbagai wilayah, membentuk jaringan perairan yang kompleks. Keberadaan sistem sungai yang luas ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam aspek pengelolaannya. Apabila pengendalian debit air pada sungai-sungai tersebut tidak dilakukan secara optimal, terutama saat musim hujan, maka potensi terjadinya banjir di berbagai daerah di Jawa Timur akan semakin meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2025), dalam periode 2019–2024, banjir menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang paling dominan di Jawa Timur.

Gambar 1. Data Jumlah Bencana di Jawa Timur Pada Tahun 2019-2024

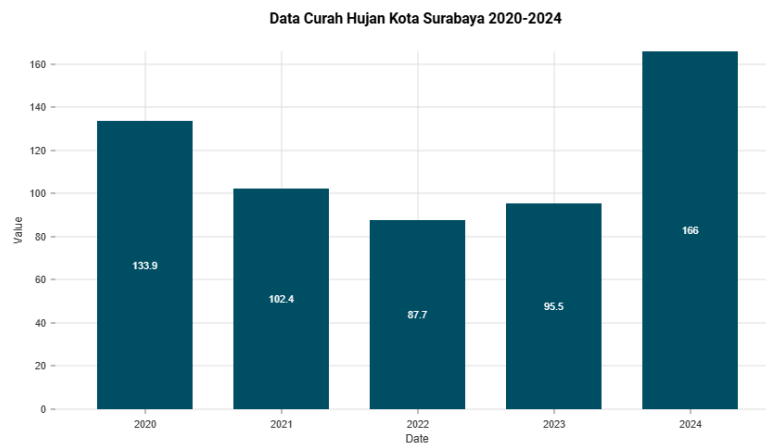


Sumber: <https://dibi.bnpb.go.id/>

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian antara 0–20 meter di atas permukaan laut, sehingga rawan mengalami banjir. Salah satu titik rawan adalah Jalan Simo Hilir di Kecamatan Sukomanunggal, yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, terutama pada jam sibuk. Ketika banjir terjadi, genangan air yang dapat mencapai lutut menghambat laju kendaraan dan menimbulkan kemacetan parah, berdampak pada keterlambatan transportasi umum dan aktivitas masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kawasan sekitar, tetapi juga meluas hingga ke wilayah seperti Banyuwangi dan Pandegiling, mengingat Jalan Simo Hilir merupakan akses utama. Minimnya jalur alternatif memaksa pengendara menggunakan gang kecil di permukiman, yang justru menambah kepadatan lalu lintas. Akibatnya, arus kendaraan

dapat terhenti selama berjam-jam. Tanpa penanganan konkret, banjir di Jalan Simo Hilir akan terus berulang dan menghambat mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Gambar 2. Data Curah Hujan Kota Surabaya Tahun 2020-2024



Sumber: <https://dataonline.bmkg.go.id>

Berdasarkan grafik, terlihat bahwa curah hujan di Surabaya mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, curah hujan mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang menandakan adanya peningkatan cukup besar. Peningkatan curah hujan yang cukup tinggi ini berdampak langsung pada potensi banjir di kawasan rawan seperti Jalan Simo Hilir di Kecamatan Sukomanunggal. Kawasan ini termasuk daerah padat dengan aktivitas lalu lintas tinggi, terutama saat jam sibuk. Ketika terjadi banjir, genangan air bisa mencapai lutut dan menyebabkan kemacetan parah yang mengganggu transportasi umum dan aktivitas masyarakat. Dampaknya juga bisa dirasakan di daerah sekitar seperti Banyuurip dan Pandegiling, karena Jalan Simo Hilir merupakan akses utama dan pilihan jalur alternatif sangat terbatas. Banyak pengendara akhirnya harus masuk ke gang-gang kecil di permukiman yang justru memperparah kepadatan lalu lintas. Dari permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Jalan Simo Hilir Kecamatan Sukomanunggal dalam mengatasi permasalahan banjir di kawasan tersebut. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kebijakan infrastruktur dan efektivitasnya dalam pengurangan risiko banjir. Studi sebelumnya menurut penelitian (Ajawaila et al., 2021) menjelaskan bahwa kendala banjir bisa dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Studi lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan penanggulangan banjir sangat bergantung pada komunikasi, sumber daya, serta koordinasi antar instansi terkait (Raya & Kusbandrijo, 2015). Namun, penelitian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di tingkat lokal, khususnya di Jalan Simo Hilir Kecamatan Sukomanunggal, masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diisi untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir guna memastikan bahwa upaya yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak. Tanpa kebijakan yang tepat dan infrastruktur yang efektif, permasalahan banjir akan terus berulang, sehingga menghambat aktivitas masyarakat serta

pembangunan wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala serta strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Jalan Simo Hilir Kecamatan Sukomanunggal. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Jalan Simo Hilir, Kecamatan Sukomanunggal. Peneliti menggunakan analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (Edwards, 1980) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi/Sikap Pelaksana (*Disposition*), dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Jalan Simo Hilir serta faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendukung dalam pelaksanaannya.

2. KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA/HIPOTESIS

Banjir adalah salah satu bencana alam yang memiliki dampak signifikan yang langsung dapat dirasakan di tengah kehidupan masyarakat, terkhusus di daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dan angka pembangunan yang cukup tinggi. Faktor-faktor penyebab banjir dapat disebabkan oleh kondisi geografis yang rendah, kondisi cuaca yang ekstrem, hingga faktor antropogenik seperti kurangnya saluran dan drainase untuk menampung air hujan, konveksi alih fungsi lahan hijau sebagai daerah resapan air menjadi area pemukiman, serta kesalahan tata ruang yang ada. Oleh karena itu, untuk mengatasi bencana banjir diperlukan suatu strategi terpadu berupa kebijakan infrastruktur yang responsif terhadap dinamika lingkungan sosial masyarakat.

Kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir menjadi aspek penting untuk dipertimbangkan, terutama pada wilayah yang topografinya relatif rendah seperti kota Surabaya. Salah satu kawasan yang menjadi titik rawan adalah Jalan Simo Hilir di Kecamatan Sukomanunggal, di mana banjir kerap terjadi dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang cukup parah. Penelitian sebelumnya oleh Raya dan Kusbandrijo (2015) menegaskan bahwa faktor seperti komunikasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan kebijakan infrastruktur. Meskipun demikian, masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas kebijakan infrastruktur di tingkat lokal, sehingga hal ini menjadi celah yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Untuk menganalisis seberapa efektif pelaksanaan kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir, teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1980) menjadi pendekatan teoritis yang tepat. Teori ini mengidentifikasi empat aspek utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun dapat dijalankan secara maksimal di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji efektivitas kebijakan penanggulangan banjir di kawasan Jalan Simo Hilir, sekaligus menggali faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Selain faktor internal birokrasi, efektivitas kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses

implementasinya. Wisner et al. (2004) menekankan pentingnya pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas sebagai strategi dalam menciptakan ketangguhan lokal terhadap bencana, termasuk banjir. Kebijakan penanggulangan harus dirancang secara fleksibel dan berbasis data, agar mampu merespons perubahan pola curah hujan, alih fungsi lahan, serta pertumbuhan penduduk yang pesat. Dengan demikian, hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan kedepannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Simo Hilir, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Daerah Simomulyo merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya yang topografinya relatif lebih rendah dibanding daerah lain disekitarnya yang menjadikannya sebagai daerah penampung aliran air sebelum memasuki muara sungai menuju laut sehingga ketika terjadi hujan yang intensitasnya cukup tinggi dan berdurasi panjang, daerah ini menjadi rawan terkena luapan air yang tak jarang mengakibatkan adanya genangan yang cukup tinggi atau bahkan banjir.

Jenis penelitian dalam kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Adlini et al., 2022) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh. Fenomena tersebut digambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Selanjutnya, menurut Sugiyono (dalam Jayusman & Shavab, 2020) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai suatu variabel independen tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Sementara itu, menurut Sukmadinata (2019), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik alami maupun buatan manusia, yang mencakup bentuk, aktivitas, karakteristik, serta hubungan antar fenomena. Dari definisi tersebut, secara umum metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam dan komprehensif.

Alasan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah karena pendekatan ini sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Jalan Simo Hilir, Kecamatan Sukomanunggal. Penelitian ini menggali berbagai sudut pandang dari stakeholder yang terlibat, seperti pemerintah daerah, dinas terkait, serta masyarakat terdampak, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

4. PEMBAHASAN

Kasus Simo Hilir dan Penyebabnya

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di kota Surabaya adalah curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan. Kondisi geografis kota surabaya yang topografinya relatif rendah, menjadikan kota surabaya sebagai salah satu tujuan aliran air hujan ketika terjadi hujan yang berkepanjangan yang berintensitas tinggi di sekitar wilayah kota surabaya, sehingga beberapa

daerah di kota surabaya yang relatif lebih rendah dari wilayah lainnya mendapatkan kiriman air dari daerah lain dan menjadikannya tujuan pembuangan air menuju muara sungai hingga ke laut yang menjadikan beberapa daerah tersebut rawan terjadi genangan air, baik dalam kurun waktu yang singkat maupun terjadinya banjir dalam kurun waktu relatif lebih lama.

Salah satu fenomena banjir yang menggemparkan wilayah barat kota surabaya terjadi pada akhir desember 2024 yang merendam sebagian wilayah bagian barat kota surabaya khususnya di sepanjang jalan Simo Hilir Kelurahan Sukomanunggal Kota Surabaya yang diakibatkan oleh hujan dengan intensitas cukup tinggi dalam waktu yang lama. Menurut Pak Dimas selaku Koordinator Bagian Penganggaran dan Perencanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan merata yang terjadi tidak hanya di kota surabaya, bahkan juga di daerah hulu seperti Mojokerto, Lamongan, dan Jombang yang menyebabkan terjadinya luapan di sepanjang aliran sungai Brantas dan anak-anak sungai yang melewati daerah kota surabaya termasuk Kali Mas dan Kali Wonokromo. Aliran air dengan debit tinggi yang datang dari hulu ke hilir melewati kota surabaya menyebabkan anak sungai yang ada di kota surabaya tidak mampu lagi menampung air hujan di kota surabaya sendiri. Alhasil rumah pompa air milik Pemkot Surabaya yang tersebar di beberapa aliran kali menjadi tidak maksimal dan *overload* dari kapasitas aslinya yang mengakibatkan salah satu bozem penahan air di jalan Simomulyo kelurahan Sukomanunggal Kota Surabaya jebol dan mengalami kerusakan. Akibatnya air yang tertampung di bozem mengalir ke jalan dan perumahan warga yang menyebabkan terjadinya genangan banjir setinggi lutut orang dewasa yang menggenangi daerah Simo kurang lebih selama satu hari satu malam.

Analisis Penanggulangan Banjir di Simo Hilir Menurut Teori George C. Edward III

Mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (Edwards, 1980) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi/Sikap Pelaksana (*Disposition*), dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Berikut analisis terhadap indikator-indikator tersebut sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Jalan Simo Hilir serta faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendukung dalam pelaksanaannya (Kurniawan, 2024).

1. Komunikasi

Edward mengemukakan bahwa implementasi akan berjalan optimal apabila individu yang bertanggungjawab dalam mewujudkan suatu tujuan kebijakan memahami dengan baik ukuran dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kejelasan mengenai ukuran dan tujuan harus tersampaikan secara tepat kepada para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, faktor komunikasi menjadi aspek yang sangat penting agar implementor kebijakan tahu persis apa yang harus dilaksanakan dan dikerjakan. Dalam komunikasi, penting untuk memperhatikan aspek keberhasilan komunikasi yaitu Transmisi atau penyaluran informasi dalam komunikasi, Kejelasan informasi yaitu tersampainya point point penting dalam komunikasi, Konsistensi informasi yaitu informasi ataupun perintah yang disampaikan dalam komunikasi harus jelas dan konsisten.

Dalam konteks implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Jalan Simo Hilir Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, komunikasi antar pelaksana kebijakan dilakukan dengan dua cara, yaitu komunikasi sentral dan komunikasi otonom. Komunikasi sentral yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dinas terhadap para pelaksana kebijakan yang berada di masing masing wilayah kerja yang dinamakan rayon yang sudah dibentuk oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya, komunikasi ini berupa komunikasi langsung antara pejabat di dinas dan para pelaksana di lapangan yang tingkat urgensitasnya tinggi dan perlu penanganan cepat ketika terjadi suatu kejadian di rayon/daerah. Dalam hal ini, kepala bidang yang bersangkutan yang berada di dinas akan melakukan komunikasi langsung terkait *decision making* dan langkah yang harus dilakukan para pelaksana kebijakan yang ada di rayon ketika terjadi bencana ataupun hal mendesak lainnya.

Selain itu, terdapat juga komunikasi otonom yaitu komunikasi yang dilakukan oleh kepala rayon selaku penanggung jawab dari rayon terhadap para pelaksana kebijakan yaitu satgas yang telah dibentuk setiap rayonnya selaku pelaksana kebijakan dalam hal *controlling, monitoring, dan fixing*. Komunikasi otonom ini mencakup komunikasi yang dilakukan oleh kepala rayon terhadap seluruh satgas yang ada terkait pengambilan keputusan untuk normalisasi dan rehabilitasi infrastruktur penunjang banjir yaitu bendungan atau bozem, selain itu kepala rayon juga diberikan wewenang untuk dapat berkoordinasi langsung dengan RT/RW setempat apabila dibutuhkan musyawarah dalam pengelolaan atau pembangunan fasilitas. Berdasarkan keterangan Pak Dimas selaku Koordinator Bagian Penganggaran dan Perencanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya saat ini Kota Surabaya memiliki kurang lebih 1.300 orang Satgas yang bersiaga dan siap ditugaskan apabila dibutuhkan untuk penanganan *urgent* yang keberhasilannya juga telah diukur oleh dinas sendiri dalam menangani permasalahan-permasalahan terkait air baik luapan, genangan maupun banjir. Jika dilihat dari keberhasilan satgas dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan terkait irigasi air terkhusus ketika terjadi bencana seperti luapan air, genangan air, dan banjir, maka komunikasi terkait implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di jalan Simo Hilir Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya sudah cukup baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Proses suatu implementasi sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Edward menjelaskan bahwa sumber daya tidak hanya mencakup anggaran atau dana, melainkan mencakup staf yang memadai baik dari segi jumlah maupun keahlian, informasi yang relevan dan akurat terkait tindakan implementasi dan pemahaman terhadap kebijakan, kewenangan atau otoritas yang cukup untuk melaksanakan tugas dan memastikan kepatuhan, serta fasilitas dan peralatan fisik yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya implementasi. Kekurangan salah satu hal fundamental tersebut dapat menjadi penghalang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam implementasinya, jumlah satuan tugas (satgas) yang bertugas di Kota Surabaya tercatat mencapai kurang lebih 1.300 personel. Meskipun jumlah tersebut tergolong besar, namun dinilai masih belum memadai untuk menangani permasalahan saluran secara

menyeluruh di seluruh wilayah kota. Misalnya pada proses pengerukan, proses tersebut kerap memerlukan waktu hingga beberapa hari untuk satu lokasi dengan jumlah saluran di Surabaya mencapai ribuan. Kondisi ini mengakibatkan tidak seluruh saluran dapat ditangani secara optimal dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai ilustrasi, pada kasus normalisasi saluran di kawasan Banyu Urip yang memiliki panjang mencapai 14 kilometer, proses pengerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama akibat keterbatasan jumlah satgas yang tersedia.

Pada teknis lapangan terdapat tim rayon yang lebih mengerti mengenai perencanaan saluran, konsep, dan arah aliran dibandingkan tim perencanaan pusat. Karena itu perencanaan dan pengawasan banyak dilimpahkan ke tim rayon. Selain itu, terdapat beberapa satgas yang memiliki sertifikat untuk mengoperasikan alat berat sehingga memudahkan pekerjaan di lapangan. Namun, pada beberapa petugas operasional pompa terdapat keterbatasan dalam pemahaman teknis yang mendalam dan cenderung menjalankan tugas operasional secara rutin, meskipun terdapat potensi signifikan untuk tindakan antisipatif harian yang dapat mengoptimalkan fungsi pompa dan kesiapsiagaan sistem.

Dalam anggaran, tim pusat menggunakan skala prioritas untuk menentukan mana yang bisa dilaksanakan segera dan mempertimbangkan juga masalah kompleksitas pekerjaannya. Namun, terdapat keterbatasan anggaran yang menjadi penghambat efektivitas implementasi. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran dari APBD sebagian besar dialokasikan pada sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. Keterbatasan anggaran ini seringkali memaksa kembali penyesuaian lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan.

Dalam pengkondisian banjir, tim rayon akan melakukan pemantauan rutin dengan membagi shift setiap harinya. Selain itu, tim rayon juga melakukan patroli keliling ke wilayah-wilayah rawan banjir dan seringkali didampingi oleh aparat dari kelurahan serta kecamatan untuk evaluasi dan monitoring di area administratif masing-masing. Terdapat juga fokus utama dari evaluasi yang dilakukan oleh tim rayon yaitu pada titik-titik yang memiliki riwayat kejadian genangan sebelumnya. Pada pemantauan, rumah pompa juga menjadi prioritas utama untuk dievaluasi dengan dukungan teknologi CCTV yang memungkinkan pimpinan untuk memantau kondisi operasional pompa secara langsung dari kantor. Namun pada konteks di Simo Hilir, terdapat kurangnya monitoring rutin dan pengecekan berkala terhadap kualitas tanggul yang menyebabkan jebolnya tanggul Simo Hilir. Hal ini dikarenakan keterbatasan tim dengan keahlian teknis khusus atau informasi teknis mendalam untuk setiap konstruksi.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi artinya kemauan dasar atau kecenderungan batin seorang pemimpin yang mempengaruhi cara berfikir, bersikap, dan bertindak ketika ia dihadapkan dalam satu situasi sehingga akan berpengaruh terhadap cara ia dalam merespons sesuatu, dalam memperlakukan orang lain, maupun dalam mengambil keputusan. Disposisi pasti dimiliki oleh setiap orang, termasuk para pelaku kebijakan sehingga manakala keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atas kebijakan yang diterapkan juga dipengaruhi oleh disposisi atau sikap pelaksana kebijakan itu sendiri. Mereka menyadari bahwa suatu kebijakan akan membawa manfaat bagi organisasi maupun bagi diri mereka pribadi apabila mereka memiliki pengetahuan yang memadai dan memahami kebijakan yang akan dilaksanakan dengan baik.

Dalam pelaksana kebijakan, terdapat 3 aspek sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan, yaitu (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan

implementator untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, sejauh mana pelaksana memahami isi dan tujuan dari kebijakan yang ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni sejauh mana nilai-nilai yang dimiliki pelaksana mempengaruhi preferensi mereka terhadap pelaksanaan kebijakan.

Mengacu pada teori Edward tentang disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor disposisi dan sikap pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Infrastruktur Penanggulangan Banjir di Jalan Simo Hilir, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya sudah baik serta memiliki tekad dan kesiapan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Kesiapan dan keterlibatan seluruh *stakeholder* yang terkait dalam pengelolaan infrastruktur penanggulangan banjir menunjukkan bahwa sikap yang dimiliki pelaksana kebijakan menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi.

Kesiapan dan komitmen pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Simo Hilir dapat dilihat dari beberapa hal berikut; *Pertama*, Pemerintah Kota Surabaya secara rutin dan berkala melakukan evaluasi terhadap infrastruktur-infrastruktur penanggulangan banjir seperti drainase, bozem, dan pintu air yang tersebar di seluruh wilayah kota surabaya. Apabila ditemukan suatu kendala atau masalah yang dianggap dapat mengurangi pemaksimalan fungsi infrastruktur, ataupun ditemukan kendala berupa kondisi dari infrastruktur yang sudah tidak maksimal, maka akan dilakukan pembebasan lahan dengan tujuan meningkatkan fungsi dan kapasitas infrastruktur dari fungsi sebelumnya. Apabila ditemukan kondisi infrastruktur yang butuh pemeliharaan bertahap seperti pengerukan endapan, perbaikan pintu air, atau pembersihan saluran, maka akan dilaksanakan pemeliharaan bertahap oleh satgas yang ada di tiap rayon untuk memaksimalkan fungsi infrastruktur. *Kedua*, Pemerintah Kota Surabaya melalui Kepala Rayon yang tersebar di wilayah Kota Surabaya kerap melakukan kerja bakti massal yang diinisiasi oleh satgas yang dimiliki setiap rayonnya sebagai bentuk mengawali kegiatan pembersihan rutin dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Biasanya, sebelum melakukan kerja bakti massal, kepala rayon akan berkoordinasi dengan Lurah dan RT/RW setempat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan dan pemeliharaan infrastruktur, alhasil tujuan dari kebijakan terkait infrastruktur tidak hanya dijalankan dan dilaksanakan oleh pemkot melalui stakeholder yang mereka miliki, namun juga melibatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pengimplementasian kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dapat didelegasikan dan dikoordinasikan antar unit dan individu di dalam organisasi. Struktur yang jelas dan terorganisir memungkinkan alur komunikasi yang efektif, koordinasi antar bagian yang efisien, serta distribusi tugas yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing masing pelaksana kebijakan.

Jika dilihat dari aspek struktur birokrasi dalam pelaksana kebijakan terkait implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Simo Hilir, bahwa koordinasi

dan kerjasama yang baik sudah terjalin antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir, baik antar pemerintah kota melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya terhadap Rayon yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya, koordinasi antar Kepala Rayon di daerah dengan Kepala Lurah, RT dan RW ketika dilakukan pemeliharaan atau perbaikan infrastruktur di wilayah bersangkutan, maupun koordinasi antar Lurah, RT dan RW terhadap warga ketika akan dilaksanakan kerja bakti massal, meskipun tidak seluruh lapisan masyarakat dapat dipastikan ikut terlibat, namun partisipasi dan keterlibatan masyarakat sudah terlihat dengan adanya koordinasi oleh pihak Lurah, RT dan RW kerap kali diadakan kerja bakti massal oleh satgas pemeliharaan infrastruktur tiap-tiap rayonnya.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Simo Hilir

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Simo Hilir, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya tidak terlepas dari dukungan, motivasi, kerja sama, kemauan, kesediaan, kesadaran akan tanggung jawab dan rasa memiliki yang muncul dari seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya, sebagai berikut;

1. Koordinasi yang solid antar stakeholder dalam melaksanakan pengawasan maupun pemeliharaan infrastruktur penanggulangan banjir mulai dari Dinas Bina Marga, Kelurahan, hingga Kecamatan dan RT/RW yang memiliki peran masing masing demi mewujudkan infrastruktur yang berdaya guna dan dapat mengurangi potensi banjir.
2. Ketersediaan satgas dan pembagian rayon khusus yang bertugas siaga saat musim penghujan dengan jadwal kerja bergilir setiap harinya yang terbagi menjadi 3 shift/hari semakin meningkatkan kesiapsiagaan. Pemantauan oleh rayon mempercepat langkah deteksi dan mitigasi dalam merespon titik genangan yang terjadi.
3. Fasilitas Infrastruktur penunjang yang fungsional seperti keberadaan rumah pompa, bozem, dan sistem saluran drainase telah terbukti membantu mengurangi genangan air yang terjadi ketika jumlah air meluap dengan cepat dan efektif.
4. Komitmen kepala daerah mulai dari Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya yang selalu berkoordinasi dengan kepala rayon dan satgas yang ada di wilayah kerja masing masing membuat pelaksanaan kebijakan semakin terukur. Selain itu, komitmen dari Lurah, RT dan RW setempat juga menjadikan langkah yang diambil selangkah lebih depan demi memaksimalkan infrastruktur yang ada.
5. Pemanfaatan teknologi dan evaluasi berkala, seperti sistem monitoring yang dilakukan langsung ke lapangan dan evaluasi pasca banjir menunjukkan pendekatan adaptif yang terus memperbaiki sistem berdasarkan evaluasi atas kejadian aktual semakin menjadikan evaluasi yang dilakukan menjadi tepat guna dan menyelesaikan masalah.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Simo Hilir

Dalam proses pengimplementasian kebijakan penanggulangan banjir di Simo Hilir, tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat yang menjadikannya tidak berjalan mulus, seperti;

1. Kesadaran masyarakat yang relatif masih rendah yang kerap membuang sampah sembarangan ke aliran sungai, bahkan sampai menyumbat saluran di rumah pompa air yang ada. Tak jarang

ditemukan sampah berukuran besar yang datang dari arah hulu aliran sungai yang menjadi penghambat kelancaran saluran air.

2. Kurangnya perhitungan teknis pada saat pembangunan konstruksi juga menjadi tantangan di kemudian hari, sehingga ketika terjadi luapan kapasitas yang besar infrastruktur menjadi rawan jebol akibat ketidakmampuan bozem menahan debit air. Hal serupa terjadi pada 24 Desember 2024 lalu, yang mengakibatkan bozem air di Simo Hilir Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya mengalami jebol. Alhasil air menjadi tidak terkontrol dan menyebabkan banjir setinggi lutut orang dewasa di sekitar tanggul.
3. Respon sosial yang kurang bijak di media sosial juga semakin memperburuk citra Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi masalah banjir, alih-alih terlibat aktif dalam mitigasi dan solusi maupun kerja bakti, masyarakat lebih memilih berkomentar arogan di sosial media yang mengakibatkan tidak terjalinnya kolaborasi antara warga dan pemerintah pasca kejadian banjir.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, diperoleh temuan penelitian bahwa dalam implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Simo Hilir Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik sebagai akibat dari kinerja pemerintah kota Surabaya yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai stakeholder yang terkait dalam kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir mulai dari Dinas SDABM sebagai pembuat kebijakan dan perpanjangan tangan pemkot, Kepala Rayon dan satgas yang tersebar di seluruh wilayah kota Surabaya, dan Kepala Kelurahan, RT serta RW terkait yang terlibat dalam pemeliharaan infrastruktur penanggulangan banjir di wilayah Simo Hilir. Tidak sampai disitu, langkah-langkah penanggulangan pasca bencana juga tidak terlepas dari fokus dan prioritas pemerintah kota Surabaya sehingga kedepannya perbaikan dan evaluasi terus dilakukan guna menekan angka terjadinya luapan, genangan, dan banjir di daerah Simo Hilir.

Kendati demikian, pelaksanaan implementasi kebijakan infrastruktur penanggulangan banjir di Simo Hilir belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dibutuhkan kesadaran dan kontribusi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai demi memaksimalkan fungsi dari kali dan bozem itu sendiri, selain itu pemeliharaan infrastruktur juga penting untuk dilakukan, terkhusus ketika dilakukan pelebaran pembangunan atau pembangunan ulang, penting untuk memperhitungkan konstruksi bangunan secara teknis agar ketika infrastruktur sudah terbangun, tidak terjadi kemungkinan kerusakan atau jebol di kemudian hari.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang relatif singkat dengan menggunakan variabel dan hipotesis yang dibangun berdasarkan penelitian terdahulu dan wawancara langsung kepada dinas terkait yaitu Dinas SDABM Kota Surabaya yaitu pak Dimas selaku Koordinator Bagian Penganggaran dan Perencanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Kepala rayon Tandes yaitu bapak Mahmudi, Satgas Pemelihara Infrastruktur Rayon Tandes, serta masyarakat sipil di wilayah sekitar bozem Simo Hilir. Kendati demikian, keterbatasan yang dimiliki peneliti dapat saja mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang tidak komprehensif.

6. REFERENSI

- Adlini, M., Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6, 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ajawaila, L. G., Rompas, W. Y., & Tulusan, F. M. G. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(104).
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2024. *Sistem Web Data Online* <https://dataonline.bmkg.go.id/>. (Accesed 2 June 2025)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2024. *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*. <https://dibi.bnpb.go.id/>. (Accesed 6 May 2025)
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* (2nd ed.). Congressional Quarterly Press.
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. In *Halaman | 13 Jurnal Artefak* (Vol. 7, Issue 1). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak>
- Kurniawan, H. (2024). *Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 Ayat (3) Tentang Kehutanan Terhadap Kerusakan Hutan di Kabupaten Seluma Perspektif Siyasa Dusturiyyah*.
- Rachmaddan, A. (2015). *Gerakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (WALHI jatim) dalam penolakan penambangan pasir nambangan kecamatan Tambak Wedi kota Surabaya*. 50–75. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16640>
- Raya, H. A., & Kusbandrijo, B. (2015). *Implementasi Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Penanganan Banjir*. 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v1i01.397>
- Setiawan, H., Jalil, M., Enggi, M., Purwadi, F., Adios, C., Brata, A. W., & Syaful Jufda, A. (2020). Analisis Penyebab Banjir di Kota Samarinda. *Jurnal Geografi Gea*, 20(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea>